

HARI PENEGAKKAN KEDAULATAN NEGARA Belum Bergema Secara Nasional



Koleksi seri perangko Serangan Umum 1 Maret 1949.

KR-Risbika Putri

YOGYA (KR) - Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, diperingati sebagai Hari Penegakkan Kedaulatan Negara selama tiga tahun terakhir. Namun peringatan hari bersejarah tersebut belum bergema dan terasa di tingkat nasional dan diperingati seluruh warga Indonesia.

"Yang menjadi tantangan selama tiga tahun ini adalah sosialisasi Hari Penegakkan Kedaulatan Negara di tingkat nasional," ungkap Kepala Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayaan DIY, Dian Lakshmi Pratiwi di Yogyakarta, Senin (19/2). Daerah-daerah yang memiliki keterkaitan sejarah turut dilibatkan dalam mensosialisasikan esensi sejarah kedaulatan bangsa. Dalam hal ini Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bangka Belitung dan Jawa Tengah. Dengan demikian Hari Penegakkan Kedaulatan Negara menjadi peringatan hari nasional.

"Tahun kemarin pun kita sudah melakukan kegiatan bersama dengan teaterikal dan talkshow. Tahun ini juga akan disusun buku tentang makna Hari Penegakkan Kedaulatan Negara untuk menyadarkan tentang ke-Indonesiaan kita, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dengan konteks yang sangat mikro agar terimplementasi di masyarakat, termasuk dalam memahami makna kedaulatan," ungkapnya.

Peringat akan Hari Penegakkan Kedaulatan Negara dan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 sangat penting dilakukan saat ini. Terlebih bangsa Indonesia baru saja menggelar pesta demokrasi Pemilu yang memicu gesekan dan friksi akibat perbedaan pilihan. Melalui peringatan hari

bersejarah itu, semua elemen masyarakat diingatkan akan makna kedaulatan bangsa. Sehingga mereka bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan alih-alih terpecah belah akibat kontestasi politik.

"Peringatan tahun ini mengingatkan nilai kebangsaan dalam situasi dan kondisi masa-masa pemilu ini agar lebih menguatkan persatuan dan kesatuan. Jadi apa yang menjadi tujuan founding father untuk sampai terjadi peristiwa yang akhirnya diperingati sebagai Hari Penegakkan Kedaulatan Negara," tandasnya.

Dian menambahkan, sejumlah agenda pun digelar untuk memperingati Hari Penegakkan Kedaulatan Negara. Diantaranya menggelar Hari Penegakkan Kedaulatan Negara melalui dialog kebangsaan, bersama sejumlah provinsi lain. Dialog menghadirkan pembicara Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan antropolog hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto. Tema yang diangkat adalah 'Kedaulatan yang Beradab Penerjemah Masa Depan Bangsa'.

"Konsep acara kita buat hibrid atau luring dan daring. Kita undang semua Forkopimda DIY berikut bupati walikota serta sejumlah provinsi lain yang punya keterkaitan sejarah dengan peristiwa itu," jelasnya.

Selain itu akan digelar tirakatan bersama di Monumen SO 1 Maret, dilanjutkan tirakatan yang akan diisi pergelaran opera dan ditutup dengan wayang kulit. Puncak acara, 1 Maret 2024, digelar upacara peringatan di Stadion Mandala Krida dan juga teatral. Pada malam harinya acara digelar di Jakarta (Aula Simfonia Kemayoran). (*3)-f

SIREKAP, Antara Peningkatan Integritas dan Penurunan Kepercayaan Publik



Cosmas Haryawan, S.TP, S.Kom, M.Cs

Dosen Prodi: Sistem Informasi
Universitas Teknologi Digital Indonesia (UTDI)
(Dahulu STMIK AKAKOM)

Bidang Penelitian dan Keminatan:
Information System, Data Analytic

Aplikasi SIREKAP akhir-akhir ini menjadi hal yang sering dibicarakan, terutama setelah selesai masa pencoblosan pemilu dan dimulainya proses perhitungan suara. Baik di media sosial seperti X, kanal berita online, maupun televisi memperbincangkan aplikasi tersebut. Sayangnya, pembicaraan lebih ke arah sentimen negatif dikarenakan banyak ditemukan adanya perbedaan jumlah suara pada data SIREKAP dengan kondisi data di lapangan.

Dalam keputusan KPU No 66 Tahun 2024 disebutkan bahwa SIREKAP atau Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu. SIREKAP adalah produk teknologi yang memiliki tujuan untuk peningkatan kecapatan, akurasi, efisiensi dan integritas data dalam proses penghitungan suara, selain itu SIREKAP juga digunakan sebagai alat dokumentasi hasil pemilihan dengan mengunggah hasil pemindaian Form Model C1 ke server.

Secara konsep, dibandingkan dengan proses rekapitulasi manual yang melakukan



proses pengecekan dan input data berjenjang dari mulai TPS, kecamatan hingga tingkat nasional maka SIREKAP memiliki kelebihan. Input data SIREKAP hanya dilakukan di TPS dan kemudian sistem akan otomatis melakukan proses rekapitulasi hingga tingkat nasional. Dikarenakan input dari pengguna diminimalisir seoptimal mungkin maka akan dapat mengurangi terjadinya human error dibandingkan jika hasil rekapitulasi dihitung manual dan dilakukan pengisian hasil perhitungan berjenjangnya juga secara manual.

Akan tetapi, seperti yang banyak diberitakan, ternyata salah satu pilar utama dalam sistem informasi yaitu keakuratan, tidak dapat dipenuhi oleh SIREKAP. Ini menyebabkan tidak hanya tujuan SIREKAP tidak tercapai, lebih dari itu hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap penggunaan sistem informasi dalam rekapitulasi.

Menilik ke aplikasi SIREKAP, kebutuhan data untuk diisikan adalah jumlah suara baik pilpres maupun pileg dalam berbagai tingkatan. Data diisikan dengan cara memfoto tiap-tiap sertifikat hasil form Model C1, kemudian dengan teknologi Artificial Intelligence dilakukan proses pengenalan pola karakter (Optical Character Recognition/OCR) dan pengenalan pola marker (Optical Mark Recognition/OMR). Jumlah suara untuk tiap jenis sertifikat tersebut akan otomatis terbaca dan dimunculkan di SIREKAP. Apabila terjadi kesalahan sistem dalam membaca maka pengguna dapat melakukan edit angka.

Untuk selanjutnya, setelah data diverifikasi oleh pengguna, maka data tersebut akan dikirimkan ke server KPU untuk direkap. Adanya perbedaan antara C1 asli dengan data yang ada di SIREKAP perlu diteliti lebih lanjut, apakah (1) pengguna memang mengirimkan data yang salah atau (2) pengguna sudah mengirimkan data yang

benar akan tetapi setelah masuk ke server KPU data berubah.

Kedua hal tersebut memiliki perbedaan sangat besar dan dapat digunakan untuk menemukan letak kesalahan awal yang terjadi. Untuk (1), diluar proses kesengajaan, banyak muncul keluhan kurang akuratnya teknologi OCR/OMR dalam membaca data, sehingga data yang terbaca berbeda dengan aslinya. Meskipun ada kesempatan pengguna untuk mengedit data, tetapi jika hal tersebut sering terjadi akan melelahkan dan menjadikan editing data dapat terlewatkan, apalagi proses pengisian SIREKAP ada di bagian akhir setelah proses pencoblosan dan perhitungan yang sangat melelahkan.

Kemudian yang paling penting adalah perlu adanya fitur validasi data yang melakukan crosscheck antar dokumen yang dibaca dan juga crosscheck dengan aturan yang ada. Sehingga, misalnya jumlah suara salah satu paslon melebihi suara sah atau berbeda dengan isi plano atau melebihi aturan batas maksimal pemilih dalam satu TPS, pengiriman akan ditolak. Untuk (2), perlu dilakukan audit forensik IT yang mendalam di bagian algoritma aplikasi, bagian keamanan sistem aplikasi, jaringan maupun API-nya, serta audit pada log basis datanya, karena ada kemungkinan perubahan disebabkan oleh aplikasi atau karena campur tangan pihak eksternal maupun internal.

Meskipun saat ini SIREKAP masih memiliki banyak kendala tetapi di era digitalisasi seperti sekarang inovasi teknologi semacam ini perlu dikembangkan dan terus disempurnakan agar ke depan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan integritas data dalam pemilu di Indonesia dan mendukung terwujudnya pemilu yang lebih demokratis dan dapat dipercaya. (***)

GABUNG BERSAMA



UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA

www.utdi.ac.id

KPU IMBAU CEK ULANG DI SETIAP TAHAPAN

Rekapitulasi Suara Tingkat Kemantren Dekati Final

YOGYA (KR) - Setelah sempat dihentikan pada 20 Februari 2024 lalu, rekapitulasi suara di tingkat kemantren akhirnya bisa dilanjutkan kembali. Hingga kemarin dari total 14 kemantren yang ada di Kota Yogya capaiannya sudah mendekati final.

Komisioner KPU Kota Yogya Divisi Teknis Penyelenggaraan Erizal, menjelaskan pihaknya selalu menandatangani kepada petugas PPK agar rutin melakukan cek dan recek atau pengecekan ulang di setiap tahapan dalam proses rekapitulasi di kemantren.

"Sebelum dilakukan finalisasi harus dicocokkan dulu datanya. Apakah masih ada yang tidak sesuai atau tidak. Kemudian nanti ketika sete-

lah finalisasi juga dicocokkan kembali. Itu selalu kami tekankan ke teman-teman di PPK," ungkapnya, Rabu (21/2).

Pengecekan ulang di tiap tahapan rekapitulasi di kemantren menurut Erizal sebagai bentuk menjaga unsur kehati-hatian sekaligus meminimalisir kekeliruan. Sehingga jika ada data yang tidak sesuai bisa langsung ditelusuri kembali. Ketika semua data

yang diunggah dalam aplikasi serta data fisik sudah sama, baru para petugas menandatangani berita acaranya. "Kalau ada yang belum fix, jangan ditandatangani dulu. Itu untuk menjaga keterbukaan semua pihak," tandasnya.

Menurutnya, tahapan yang diatur dalam undang-undang setelah pencoblosan ialah penghitungan di TPS, rekapitulasi di kecamatan atau kemantren, rekapitulasi di tingkat kota, provinsi dan terakhir di pusat. Rekapitulasi di tingkat kemantren yang sudah dilakukan sejak 16 Februari 2024 lalu untuk memastikan kembali hasil perhitungan di tiap TPS yang ada di masing-masing ke-

lurahan. Oleh karena itu, ketika saat rekapitulasi di kemantren terdapat selisih data, KPU justru tidak mempersoalkan jika harus sampai membuka kotak suara.

Bahkan, imbuh Erizal, semua kemantren terjadi pembukaan kotak suara untuk menelusuri selisih data. Akan tetapi hal itu tidak berpengaruh terhadap perolehan suara peserta pemilu melainkan kesalahan dalam pencatatan.

"Misalnya ada yang salah tulis kemudian surat suara yang keliru coblos ditambahkan ke surat suara tidak sah. Itu bisa berpengaruh dalam proses administrasi. Harusnya surat suara itu

hanya sekian namun dicatatkan lebih," katanya.

Kendati demikian pihaknya justru mempersilakan jika memang harus dilakukan pembukaan kotak suara guna memastikan letak kekeliruan. Pasalnya, sesuai tahapan rekapitulasi, segala persoalan yang terjadi di TPS atau ke-lurahan harus sudah bisa diselesaikan di tingkat kemantren. Sedangkan nanti saat rekapitulasi di tingkat kota tinggal mencocokkan hasil rekapitulasi di tiap kemantren serta mengelompokkannya sesuai daerah pemilihan.

Sementara itu sejumlah kemantren bahkan sudah selesai melakukan rekapitulasi

seperti Kotagede, Danurejan, Jetis, Tegalrejo, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan dan Kraton. Sedangkan beberapa kemantren lain juga sudah memasuki tahap finalisasi antara lain Wirobrajan, Gondokusuman dan Gedongtengen. Sedangkan Kemantren Merangsan, Mantrijeron dan Umbulharjo juga sudah memasuki tahap akhir untuk segera diajukan finalisasi. Diperkirakan dalam satu hari ini rekapitulasi di seluruh kemantren sudah bisa diselesaikan. Tinggal nanti ada penyelesaian dengan pemilihan suara ulang (PSU) di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang meliputi dua TPS di sana.

(Dhi)-f

Taman Pintar Kejar Target 800.000 Pengunjung

YOGYA (KR) - Taman Pintar Yogyakarta sepanjang tahun ini bakal mengejar target 800.000 pengunjung. Target tersebut sebenarnya masih sama dengan tahun lalu karena menyesuaikan dengan tipologi pengunjung setelah pandemi Covid-19 tiga tahun lalu.

Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya Kota Yogya Retno Yuliyani, selaku pengelola Taman Pintar menilai pandemi Covid-19 menyebabkan dinamika tingkat kunjungan ke wahana edukasi dan rekreasi tersebut. "Dinamika pengunjung Taman Pintar itu dibagi tiga. Sebelum pandemi, ketika pandemi, dan sesudah pandemi. Sebelum pandemi kita bisa mencapai satu juta pengunjung, lalu selama pandemi tahun pertama menurun menjadi 230.000 pengunjung," ungkapnya, Rabu (21/2).

Kemudian pada pandemi berikutnya turun lagi menjadi 130.000 pengunjung. Hal tersebut disebabkan adanya penutupan wahana seiring pembatasan kegiatan masyarakat. Sementara pada tahun 2022, lanjutnya, jumlah pengunjung mulai naik yakni sekitar 700.000 pengunjung. Sedangkan pada tahun 2023 kemarin hampir 800.000 pengunjung yang membanjiri Taman Pintar.

Retno memaparkan lonjakan pe-

ngunjung biasanya terjadi ketika awal dan pada saat akhir tahun. Adapun kunjungan tersebut didominasi oleh rombongan wisata atau study tour sekolah-sekolah dari DIY dan berbagai daerah di tanah air. "Biasanya awal dan akhir tahun, terus ketika liburan sekolah antara bulan Juni dan Juli. Ketika menjelang puasa agak sedikit menurun, tapi nanti ketika lebaran naik lagi," imbuhnya.

Untuk menarik para pengunjung, pihaknya pun terus melakukan berbagai langkah, seperti melakukan peremajaan pada alat peraga atau bermain serta melakukan berbagai inovasi. Apalagi wisata edukasi dewasa ini juga cukup merebak di pusat-pusat perbelanjaan sehingga dibutuhkan inovasi dan peremajaan alat peraga untuk terus menarik para pengunjung. Khususnya pengunjung dari kelompok wisatawan keluarga.

Sementara untuk target pendapatan, pada tahun ini pihaknya menargetkan Rp 13,5 miliar. "Untuk pendapatan Taman Pintar tidak hanya dari tiket pengunjung tapi juga kami juga menyewakan area komersial. Kadang area playground sering disewa untuk acara seperti pameran, gedung ruang rapat kami juga sering disewa," katanya. (Dhi)-f

IBSE 2024 Konektivitas Antar Pelaku Bisnis di Dunia

YOGYA (KR) - International Business Solution Expo (IBSE) 2024 resmi diluncurkan pada Selasa (20/2) di Grand Tjokro Hotel, Jalan Affandi Yogyakarta dihadiri pejabat, pengusaha serta asosiasi dan komunitas bisnis. IBSE dijadwalkan akan berlangsung di Jogja Expo Center (JEC) pada 22-24 April 2024.

Ketua Panitia IBSE 2024, Adit Setiawan yang kini menjabat Local President JCI Borobudur memaparkan, IBSE menjadi tempat bertemunya para pelaku bisnis (berbagai sektor) dengan para penyedia solusi bisnis terdepan dari berbagai negara.

"IBSE membuka peluang kerja sama dan investasi baru," katanya.

IBSE 2024 diinisiasi oleh M Adib Fikri (National President JCI Indonesia) bekerja sama dengan Kadin, Hipmi, Apindo dan ICC Indonesia. IBSE tahun ini mengangkat tema 'Inovasi, Kolaborasi



KR-Istimewa

Peluncuran International Business Solution Expo (IBSE) 2024.

dan Heritage' dan ditargetkan akan dihadiri 200 peserta pameran dan 35 ribu pengunjung. Event ini terbuka untuk umum dan gratis.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mendukung penuh pelaksanaan IBSE 2024.

"Pemerintah komitmen untuk mendukung pengembangan solusi bisnis

inovatif dan mendorong kolaborasi lintas batas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi," katanya.

Sambutan tentang tujuan besar IBSE 2024 bagi pengusaha juga disampaikan oleh Ilham Akbar Habibie (President ICC Indonesia), Kaveen Kumar (Presiden Junior Chamber International) dan M Adib Fikri (National President JCI Indo-

nesia).
Coach Wulan selaku Senator JCI dan Advisor IBSE mengatakan, IBSE 2024 lebih dari sekadar pameran. Selain mempertemukan para pengusaha, juga mempertemukan perusahaan dengan potensial angkatan kerja, potensial pemegang internasional serta membentuk ekosistem wirausaha baru. (Dev)-f